

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi.

Perubahan perundang-undangan didalam sektor publik di bidang keuangan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa

faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995 dalam Latifah : 2007). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut (Latifah : 2007), diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan.

Laporan keuangan pemerintah daerah lampung tengah setiap tahun mendapatkan penelitian berupa opini, selama 2012-2015 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan opini WDP (www.bpk.go.id). Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah belum dapat menyusun laporan keuangan dengan peraturan pemerintah yang baru karena kurangnya SDM yang memahami mengenai sistem akuntansi berbasis akrual sehingga memerlukan kompetensi baru bagi SDM yang sudah ada atau menghadirkan tenaga baru yang lebih memahami sistem akuntansi tersebut (Zanaria 2016). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (*reliable information*) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan (Mohammad, 2004: 277). Sedangkan akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007). Perpaduan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pemerintah daerah yaitu antara masyarakat daerah dan pemerintah pusatlah yang melahirkan sistem pengawasan yang baik, benar dan bermutu (Halim, 2007:9).

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi

manajemen (Krumweide, 1998 dalam Latifah dan Sabeni 2007). Menurut Lubis (2011) perilaku keorganisasian adalah studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi dalam organisasi. Perilaku organisasi ini didasarkan pada analisis terhadap manusia yang ditujukan bagi kemanfaatan orang. Sedangkan menurut Thoha (2002) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Penelitian yang dilakukan Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), menunjukkan hasil bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standar) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. Dukungan atasan berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Latifah dan Sabeni (2007) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian

sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor faktor organisasional seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Dalam menyusun laporan keuangan maka dibutuhkan dukungan atasan. Atasan bisa memberikan dukungan berupa motivasi dan contoh sikap yang etis dan beretika kepada bawahan sehingga bawahan dapat bekerja lebih baik. Dengan adanya dukungan atasan maka karyawan bisa bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan kinerja karyawan meningkat dan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kejelasan tujuan mengacu pada tujuan akhir dimana tujuan pekerjaan tersebut dijelaskan dengan teliti dan didefinisikan dengan baik. Kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi karyawan. Apabila kejelasan tujuan tidak digunakan tepat dan tidak didukung secara aktif oleh atasan maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas. Pelatihan dilaksanakan untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya pelatihan maka pegawai bisa membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Astuti (2017) dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, penelitian ini memfokuskan pada tiga faktor yaitu Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan. Hasil dari penelitian Astuti (2017) di simpulkan bahwa faktor berperilaku seperti dukungan atasan dan kejelasan tujuan berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan variabel pelatihan tidak berpengaruh. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada cakupan wilayah dan objek penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Lampung Tengah berbeda dimana dengan penelitian yang dilakukan Astuti (2017) meneliti di pemerintah Kota Kediri.

Bedarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan faktor keprilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (Survei Pada SKPD) Kabupaten Lampung Tengah)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1. Secara garis besar yang diteliti adalah tentang keprilakuan organisasi seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten lampung tengah.
3. Objek penelitian ini difokuskan kepada Pegawai keuangan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten lampung tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor keprilakuan organisasi seperti dukungan atasan akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah ?
2. Apakah faktor keprilakuan organisasi seperti kejelasan tujuan akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah ?
3. Apakah faktor keprilakuan organisasi seperti pelatihan akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh faktor keprilakuan organisasi (dukungan atasan) akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh faktor keprilakuan organisasi (kejelasan tujuan) akan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh faktor keprilakuan organisasi (pelatihan) akan langsung terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi SKPD Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah dituangkan dalam peraturan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah harus transparansi, efektif, efisien dan akuntabilitas dan konsep-konsep tentang dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan sebagai dukungan dalam peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di SKPD Lampung Tengah.

b. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah sistem akuntansi keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan mengenai informasi materi penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunakan latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, kemudian metode analisis data seperti apa yang dilakukan serta pengujian hipotesisnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN